

## DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BALI

Nural Achmad Raainaa<sup>1)</sup>; Muadz Muawwidz Zahrurrijal<sup>2)</sup>

<sup>1)</sup> nural\_4132230015@pknstan.ac.id, Politeknik Keuangan Negara STAN

<sup>2)</sup> rizal\_4132230060@pknstan.ac.id, Politeknik Keuangan Negara STAN

### Abstract

The COVID-19 pandemic has created significant dynamics in the financial sector, especially at the local government level. Bali Province, as a major tourism destination, is facing major challenges due to the global and local economic downturn triggered by the pandemic. This research aims to evaluate the impact of the pandemic on the financial performance of the Regional Government of Bali Province. This research aims to analyze changes in income, expenditure, independence ratio, effectiveness, efficiency, and regional financial activities in Bali Province during the COVID-19 pandemic period. Thus, it is hoped that this research will provide in-depth insight into how the pandemic has impacted regional financial structures. This research uses a descriptive quantitative method by analyzing regional financial data for the Province of Bali from 2019 to 2022. The data is analyzed using financial ratios which include income growth, independence ratio, effectiveness of local revenue (PAD), efficiency of PAD collection, and economic ratio. The research results show that the COVID-19 pandemic had a significant impact on regional income, with a sharp decline in 2020. Despite recovery in subsequent years, several regions in Bali Province showed noteworthy fluctuations in their financial performance. The self-reliance ratio increases in 2022, signaling the province's efforts to reduce dependence on transfers and loans. The implications of this research provide an in-depth understanding of the regional financial dynamics of Bali Province during the pandemic. These findings can serve as a basis for developing adaptive financial policies and strategies, as well as provide guidance for other local governments facing similar challenges.

**Keywords:** Bali Province, COVID-19, Financial Performance, Financial Ratio, Pandemic.

### Abstrak

Pandemi COVID-19 telah menciptakan dinamika signifikan dalam sektor keuangan, khususnya pada tingkat pemerintah daerah. Provinsi Bali, sebagai destinasi pariwisata utama, menghadapi tantangan besar akibat penurunan ekonomi global dan lokal yang dipicu oleh pandemi. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak pandemi tersebut terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Bali. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan pendapatan, belanja, rasio kemandirian, efektivitas, efisiensi, dan aktivitas keuangan daerah Provinsi Bali selama periode pandemi COVID-19. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana pandemi berdampak pada struktur keuangan daerah. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan menganalisis data keuangan daerah Provinsi Bali dari tahun 2019 hingga 2022. Data dianalisis dengan menggunakan rasio keuangan yang mencakup pertumbuhan pendapatan, rasio kemandirian, efektivitas penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), efisiensi pemungutan PAD, dan rasio ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 memberikan dampak signifikan terhadap pendapatan daerah, dengan penurunan tajam pada tahun 2020. Meskipun terjadi pemulihan pada tahun-tahun berikutnya, beberapa daerah di Provinsi Bali menunjukkan fluktuasi yang perlu diperhatikan dalam kinerja keuangan mereka. Rasio kemandirian meningkat pada tahun 2022, menandakan usaha provinsi untuk mengurangi ketergantungan pada transfer dan pinjaman. Implikasi dari penelitian ini memberikan pemahaman mendalam terhadap dinamika keuangan daerah Provinsi Bali selama pandemi. Temuan ini dapat menjadi dasar untuk menyusun kebijakan dan strategi keuangan yang adaptif, serta memberikan panduan bagi pemerintah daerah lain yang menghadapi tantangan serupa.

**Kata Kunci:** COVID-19, Kinerja Keuangan, Pandemi, Provinsi Bali, Rasio Keuangan.

### PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 telah membawa dampak yang sangat signifikan terhadap perekonomian global, termasuk Indonesia. Rantai pasok dunia terganggu, investasi asing menurun, dan pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan drastis. Salah satu entitas yang merasakan dampaknya adalah pemerintah daerah Provinsi Bali. Pandemi ini tidak hanya menciptakan tantangan kesehatan masyarakat, tetapi juga mengubah lanskap ekonomi dan keuangan, memaksa pemerintah daerah untuk menyesuaikan strategi dan kebijakan fiskalnya. Pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Indonesia turun tajam dari 5,02 Persen menjadi 2,97 Persen. Data Bank Dunia juga mencatat peningkatan angka pengangguran dari 5,28 Persen pada



tahun 2019 menjadi 7,07 Persen pada tahun 2020. Dalam konteks ini, pemerintah daerah Provinsi Bali, sebagai salah satu pilar ekonomi nasional yang sangat bergantung pada sektor pariwisata, mengalami tekanan ekonomi yang luar biasa (sumber: <https://www.djkn.kemenkeu.go.id>).

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada kuartal I tahun 2020 tercatat sebesar 2.97%, dipengaruhi oleh penerapan pembatasan aktivitas masyarakat. Kuartal II mengalami penurunan signifikan mencapai -5.32% akibat peningkatan kasus Covid-19 pada bulan Juni, dengan 168.780 orang terkonfirmasi positif (*World Health Organization*, 2020). Pemerintah segera merespons dengan menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) mulai April 2020 di Provinsi DKI Jakarta. Kuartal III melanjutkan tren negatif dengan pertumbuhan -3.49%, sementara kuartal IV mengalami perbaikan menjadi -2.17% (Venni et al., 2023). Pada kuartal I tahun 2021, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih rendah, mencapai -0.69%. Namun, kuartal II menandai pertumbuhan tertinggi selama pandemi, mencapai 7.08%, didorong oleh penguatan sektor lapangan usaha dan transportasi (Badan Pusat Statistik, 2021). Bank Indonesia (2021) mencatat perlambatan pertumbuhan ekonomi di kuartal III (3,53%) karena penyebaran varian delta Covid-19, sementara kuartal IV tahun 2021 menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 5.03%.

Menurut pandangan yang diungkapkan oleh (Puspita & Pangastuti, 2022) laporan keuangan memiliki potensi untuk mencerminkan kemampuan suatu daerah dalam mengatur dan mengelola kebutuhannya. Keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya dapat tercermin melalui kinerja keuangan, yang pada gilirannya mencerminkan tingkat akuntabilitas dalam memberikan pelayanan publik. Evaluasi kinerja keuangan dapat dilakukan oleh analisis menggunakan sejumlah rasio keuangan, seperti rasio pertumbuhan, rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio keserasian, dan rasio ekonomi.

Berdasarkan penelitian (Fajria et al., 2021) dampak pandemi COVID-19 secara signifikan mempengaruhi kinerja ekonomi Provinsi Bali. Pada triwulan IV tahun 2020, meskipun terdapat sedikit perbaikan dibanding triwulan sebelumnya, ekonomi Bali masih mengalami kontraksi sebesar 12,21%. Penurunan ini dipicu oleh kebijakan *travel restriction* dan *lockdown* di beberapa negara, yang menghambat kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali, menekan sektor pariwisata. Perbaikan terbatas ekonomi Bali terutama dipicu oleh kunjungan wisatawan nusantara selama libur natal dan tahun baru. Sementara dari aspek pengeluaran, pemulihan ekonomi Bali terlihat dari konsumsi pemerintah, investasi, dan ekspor luar negeri. Secara keseluruhan, ekonomi Bali mengalami kontraksi sebesar 9,31% pada tahun 2020, yang lebih rendah dibanding pertumbuhan positif tahun 2019. Adanya kebijakan *travel restriction* sejak Maret 2020 juga menyebabkan penurunan kunjungan wisatawan, yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi positif di kabupaten/kota Provinsi Bali yang pada tahun 2020 mengalami penurunan.

Masalah pertumbuhan ekonomi sebagaimana tergambar pada fenomena yang dialami Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali di atas, dapat dianggap sebagai isu makro ekonomi dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi memiliki peran kunci dalam mencapai tujuan ekonomi makro. Dalam konteks makro ekonomi, peran Pemerintah sebagai regulator kebijakan dan pembuat undang-undang memiliki dampak signifikan. Sebagai respons terhadap fenomena tersebut, pada tahun 1999, Pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang No. 22 dan No. 25 tentang Pemerintah Daerah dan Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Pada tahun 2004, Pemerintah menggantinya dengan Undang-Undang No. 32 dan No. 34 Tahun 2004. Kedua undang-undang tersebut menekankan pada kewenangan daerah tanpa menciptakan delegasi dan desentralisasi fiskal menjadi konsekuensi langsung dari kewenangan atau fungsi yang diserahkan kepada daerah. Desentralisasi fiskal ini mencakup pengaturan dan upaya untuk mencapai perimbangan keuangan secara vertikal antara pusat dan daerah,

bertujuan untuk membiayai tugas yang menjadi tanggung jawab daerah tersebut (Fajria et al., 2021).

Pandemi ini tidak hanya merubah cara hidup masyarakat tetapi juga memaksa adanya pembatasan dalam aktivitas ekonomi. Protokol kesehatan seperti penggunaan masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan, secara langsung mempengaruhi kegiatan produksi, distribusi, dan pemasaran barang dan jasa di seluruh dunia. Provinsi Bali yang dikenal sebagai destinasi pariwisata utama, menjadi salah satu yang paling terpukul. Sebagian besar pendapatan daerah berasal dari industri pariwisata, dan sebagian besar pengunjung berasal dari luar negeri. Ketergantungan yang tinggi pada wisatawan asing membuat dampak ekonomi pandemi Covid-19 sangat terasa di Provinsi Bali. Berkurangnya jumlah turis, pembatasan perjalanan, dan penutupan tempat wisata telah memberikan pukulan keras pada sektor pariwisata di pulau ini.

Dari latar belakang di atas dapat disimpulkan bahwa penulis tertarik untuk melakukan analisis terhadap kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Bali dengan membaginya ke dalam empat fase kritis. Fase-fase tersebut melibatkan tahun 2019, yang mencerminkan kondisi sebelum pandemi Covid-19 melanda, tahun 2020 yang merepresentasikan periode pertama kali saat pandemi berlangsung, tahun 2021 yang menandai fase peralihan, dan tahun 2022 yang menggambarkan masa pasca-pandemi atau endemi. Keempat fase ini diharapkan dapat memberikan gambaran holistik terhadap dampak pandemi terhadap kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Bali, memungkinkan identifikasi perubahan signifikan dalam laporan keuangan selama periode tersebut.

Penulis menganalisis rasio keuangan seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bali, namun, dalam laporan ini, fokus penulis tertuju pada empat kabupaten utama, yaitu Badung, Bangli, Buleleng, dan Gianyar. Pemilihan ini didasarkan pada pertimbangan keterbatasan jumlah halaman serta penekanan peneliti pada kabupaten-kabupaten tersebut, yang mana mengalami penurunan ekstrem dan memiliki dampak signifikan terhadap kinerja keuangan secara keseluruhan di Provinsi Bali. Dengan memusatkan analisis pada kabupaten-kabupaten ini, penulis dapat menggambarkan dengan lebih mendetail dampak pandemi COVID-19 terhadap aspek keuangan, seperti pendapatan, belanja, rasio kemandirian, efektivitas, efisiensi, dan aktivitas keuangan daerah. Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif tentang tantangan dan peluang yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Provinsi Bali dalam mengelola keuangan daerah di tengah kondisi ekonomi yang penuh ketidakpastian.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Teori Keagenan**

Sejak era otonomi daerah diterapkan pada tahun 1999 pemerintah daerah di Indonesia mengalami transformasi signifikan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Seiring dengan perubahan ini, muncul pula penerapan teori keagenan (*agency theory*) sebagai kerangka konseptual dalam mengelola hubungan antara pemegang kebijakan dan pihak yang diwakili. Tinjauan teori ini bertujuan untuk menyelidiki bagaimana konsep keagenan diterapkan dalam konteks otonomi daerah, dengan fokus pada hubungan antara eksekutif dan legislatif, serta hubungan antara legislatif dan rakyat (Yulianti et al., 2023).

Teori keagenan yang pertama kali diperkenalkan oleh Jensen dan Meckling pada tahun 1976, merupakan kerangka kerja yang melibatkan hubungan antara pemilik dan agen yang bertindak atas nama pemilik. Dalam konteks otonomi daerah, pemilik dapat diidentifikasi sebagai rakyat yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah sebagai agen untuk mewakili kepentingan mereka. Teori ini menyajikan model analitis yang dapat membantu memahami konflik kepentingan antara pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengambilan Keputusan (Zaki et al., 2023). Dalam konteks otonomi daerah penerapan teori keagenan mengarah pada dua perspektif utama. Pertama, teori ini dapat diterapkan untuk memahami

hubungan antara eksekutif dan legislatif dalam konteks pemerintahan daerah. Hubungan ini mencerminkan dinamika antara gubernur atau kepala daerah sebagai eksekutif dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) sebagai legislatif.

Pandangan pertama menekankan pada dinamika prinsipal-agensial, di mana eksekutif sebagai agen memiliki tanggung jawab untuk menjalankan kebijakan dan program yang sesuai dengan kepentingan rakyat. Gubernur atau kepala daerah bertindak sebagai agen utama yang harus bertanggung jawab kepada pemilik kebijakan, yaitu rakyat yang diwakili oleh DPRD. Dalam kerangka ini, teori keagenan dapat membantu menganalisis bagaimana insentif, kontrol, dan pertanggungjawaban diatur untuk memastikan bahwa kepentingan rakyat tetap menjadi fokus utama dalam pengambilan keputusan di tingkat eksekutif.

Pandangan kedua dalam penerapan teori keagenan pada konteks otonomi daerah berkaitan dengan hubungan antara legislatif dan rakyat. DPRD, sebagai lembaga legislatif di tingkat daerah, dianggap sebagai agen yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kebijakan dan program yang dihasilkan mencerminkan kebutuhan dan keinginan rakyat yang diwakili. Dalam kerangka teori keagenan, DPRD bertindak sebagai agen yang mewakili rakyat sebagai prinsipal (Wardoyo et al., 2022). Dalam perannya, DPRD harus memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan tidak hanya mencerminkan kepentingan politik dan individu, tetapi juga mengakomodasi kebutuhan rakyat secara keseluruhan. Teori keagenan dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana mekanisme insentif dan kontrol diatur dalam hubungan ini untuk memastikan bahwa DPRD bertanggung jawab secara efektif kepada rakyat.

Meskipun teori keagenan memberikan pandangan analitis yang kaya terkait hubungan agen-prinsipal, penerapannya dalam konteks otonomi daerah tidak terlepas dari sejumlah tantangan. Salah satu tantangan utama adalah kompleksitas dan diversitas kepentingan yang harus diakomodasi oleh agen, baik itu eksekutif maupun legislatif. Dalam kondisi ini, peran kontrol, transparansi, dan pertanggungjawaban menjadi kunci dalam menjaga keseimbangan kepentingan yang beragam. Menurut (Maria et al., 2021) Penerapan teori keagenan dalam otonomi daerah juga memiliki dampak signifikan terhadap kualitas pengambilan keputusan dan efisiensi pengelolaan pemerintahan daerah. Mekanisme insentif yang tepat dapat mendorong agen untuk bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal, sementara kontrol yang efektif dapat mencegah terjadinya perilaku agen yang tidak diinginkan.

Tinjauan teori keagenan dalam konteks otonomi daerah menyoroti kompleksitas hubungan antara eksekutif, legislatif, dan rakyat. Dengan memahami dinamika prinsipal-agensial, penerapan teori keagenan memberikan kerangka konseptual yang bermanfaat untuk menganalisis dan meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah. Meskipun tantangan dan kompleksitas terdapat dalam penerapan teori ini, keuntungan dalam meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi pengelolaan pemerintahan daerah memberikan dorongan untuk terus menjadikan teori keagenan sebagai pedoman yang relevan dalam konteks otonomi daerah di Indonesia.

### **Laporan Keuangan**

Menurut (Putri, 2020) Laporan keuangan adalah sebuah dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan suatu entitas pada suatu periode waktu tertentu dan memberikan informasi mengenai kinerja serta posisi keuangan entitas tersebut. Laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting dalam dunia bisnis dan keuangan, menjadi sumber informasi yang krusial bagi berbagai pihak terkait, seperti pemilik, investor, kreditor, pemerintah, dan pihak internal perusahaan. Laporan keuangan adalah ringkasan sistematis dari aktivitas keuangan dan posisi keuangan suatu entitas pada suatu periode waktu. Menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK), laporan keuangan terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Neraca memberikan gambaran mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas suatu entitas pada suatu titik waktu. Laporan laba rugi

mencerminkan pendapatan, biaya, dan laba bersih selama periode tertentu. Laporan arus kas menggambarkan perubahan dalam kas dan setara kas selama periode tertentu (Darwis et al., 2022).

Laporan keuangan bukan hanya sekadar daftar angka-angka, melainkan sebuah narasi keuangan yang memberikan pemahaman yang mendalam tentang kinerja keuangan suatu entitas. Informasi yang terdapat dalam laporan keuangan harus relevan, dapat diandalkan, dan dapat diukur dengan kepastian yang memadai. Tujuan utama dari penyusunan laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi yang relevan dan dapat diandalkan kepada pengguna eksternal dan internal untuk membuat keputusan ekonomi yang lebih baik. Pengguna eksternal meliputi investor, kreditur, analis keuangan, pemerintah, dan masyarakat umum, sedangkan pengguna internal adalah manajemen dan karyawan Perusahaan (Widiastoeti & Sari, 2020). Laporan keuangan memberikan gambaran yang jelas mengenai kinerja keuangan suatu entitas, mencakup aspek-aspek seperti likuiditas, profitabilitas, dan solvabilitas. Informasi ini memberikan pemahaman yang mendalam mengenai sejauh mana entitas dapat menghasilkan laba, mengelola likuiditasnya, dan memenuhi kewajiban finansialnya. Komponen-Komponen Laporan Keuangan terdiri dari :

***Neraca (Balance Sheet)***

Neraca adalah bagian dari laporan keuangan yang menunjukkan posisi keuangan suatu entitas pada suatu titik waktu. Neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas. Aset mencakup semua properti dan hak milik entitas, kewajiban mencakup utang dan kewajiban lainnya, sedangkan ekuitas mencerminkan kepentingan pemilik terhadap entitas.

***Laporan Laba Rugi (Income Statement)***

Laporan laba rugi memberikan gambaran mengenai performa keuangan entitas selama suatu periode waktu. Laporan ini mencakup pendapatan, biaya, dan laba bersih. Pendapatan berasal dari penjualan barang atau jasa, sedangkan biaya melibatkan semua pengeluaran yang diperlukan untuk menghasilkan pendapatan tersebut.

***Laporan Arus Kas (Cash Flow Statement)***

Laporan arus kas menyajikan informasi mengenai aliran masuk dan keluar kas selama suatu periode. Ini mencakup aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Laporan ini memberikan pemahaman yang penting mengenai sumber dan penggunaan kas entitas.

***Catatan Atas Laporan Keuangan (Notes to Financial Statements)***

Catatan ini memberikan penjelasan dan rincian tambahan terkait dengan pos-pos yang terdapat dalam laporan keuangan. Catatan ini dapat mencakup kebijakan akuntansi, peristiwa pasca-tanggal neraca, dan informasi lain yang dapat memperjelas interpretasi laporan keuangan.

Pada era digital dan teknologi informasi memiliki dampak signifikan pada penyajian laporan keuangan. Penggunaan perangkat lunak akuntansi dan sistem ERP (*Enterprise Resource Planning*) mempermudah penyusunan, analisis, dan distribusi laporan keuangan. Teknologi *blockchain* juga mulai diterapkan untuk meningkatkan keamanan dan transparansi informasi keuangan. Meskipun laporan keuangan memiliki peran krusial, penyusunannya tidaklah tanpa tantangan. Beberapa tantangan melibatkan kompleksitas aturan akuntansi, interpretasi kebijakan akuntansi, dan perubahan regulasi. Selain itu, perusahaan seringkali dihadapkan pada kebutuhan untuk menyajikan informasi yang tidak hanya akurat tetapi juga relevan dan dapat dimengerti oleh pengguna laporan keuangan.

Secara umum keuangan daerah dapat dikarakterisasikan sebagai seluruh hak dan kewajiban yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang memiliki nilai moneter, termasuk segala bentuk aset dalam bentuk uang dan barang yang dapat menjadi kepemilikan daerah, terkait dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Definisi ini sesuai dengan ketentuan yang diuraikan dalam Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah. Sementara itu, konsep lainnya menjelaskan bahwa keuangan daerah melibatkan semua hak dan kewajiban yang dapat diukur dengan nilai moneter, termasuk uang atau barang yang dapat dijadikan sebagai kekayaan daerah, selama barang tersebut tidak dimiliki oleh entitas negara atau daerah yang memiliki hierarki lebih tinggi, dan entitas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Purnomo & Danuta, 2022). Prinsip-prinsip yang diterapkan dalam pengelolaan keuangan daerah adalah:

***Transparansi***

Transparansi mengacu pada keterbukaan dan keterlihatan informasi keuangan daerah. Prinsip ini menuntut bahwa segala kegiatan keuangan, kebijakan, dan keputusan yang berpengaruh terhadap keuangan daerah harus dapat diakses dan dipahami dengan mudah oleh publik. Dengan transparansi, masyarakat dapat memonitor, mengevaluasi, dan mengawasi penggunaan dana publik oleh pemerintah daerah.

***Akuntabilitas***

Akuntabilitas mencakup kewajiban pemerintah daerah untuk bertanggung jawab atas kebijakan dan tindakan keuangannya. Prinsip ini menekankan pentingnya pemerintah daerah memberikan pertanggungjawaban kepada pihak-pihak yang berkepentingan, baik itu masyarakat, pemangku kepentingan internal, atau pihak eksternal. Akuntabilitas melibatkan penyediaan informasi yang jelas, evaluasi kinerja, dan pengambilan tanggung jawab atas keputusan keuangan.

***Value For Money***

Value For Money (Nilai Uang) mengacu pada pencapaian hasil yang maksimal dengan penggunaan sumber daya yang tersedia. Prinsip ini menekankan efisiensi, efektivitas, dan ekonomisasi dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan menerapkan Value For Money, pemerintah daerah diharapkan dapat mencapai tujuan-tujuan mereka dengan menggunakan sumber daya finansial secara optimal, menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya untuk masyarakat. Value For Money memiliki beberapa indikator yaitu sebagai berikut :

***Efisiensi***

Prinsip ini menekankan pada upaya untuk mencapai hasil yang maksimal dengan sumber daya yang tersedia. Pengelolaan keuangan daerah yang efisien memastikan bahwa setiap anggaran dan pengeluaran dikelola dengan cara yang paling produktif dan ekonomis.

***Kewajaran (Equity)***

Prinsip kewajaran mengacu pada keadilan dalam alokasi dan distribusi sumber daya keuangan daerah. Adilnya penyaluran dana dan pemanfaatan anggaran harus memperhatikan kebutuhan yang beragam dari berbagai lapisan masyarakat, sehingga tidak menimbulkan disparitas yang tidak adil.

***Kemandirian (Autonomy)***

Prinsip kemandirian menekankan pentingnya pemerintah daerah untuk memiliki kendali dan otonomi dalam mengelola keuangannya sendiri. Kemandirian ini mencakup kemampuan untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya finansial tanpa campur tangan yang berlebihan dari pemerintah pusat.

Penerapan prinsip-prinsip ini menjadi landasan untuk mencapai tujuan pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien. Dengan memperkuat aspek-aspek seperti transparansi, akuntabilitas, nilai untuk uang, efisiensi, kewajaran, kemandirian, partisipasi masyarakat, kedisiplinan anggaran, dan inovasi, pemerintah daerah dapat membangun fondasi yang kuat untuk mencapai keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat setempat. Keselarasan antara prinsip-prinsip ini akan memperkuat integritas dan daya kelola keuangan daerah dalam menghadapi tantangan dan peluang di masa depan. Dalam kesimpulannya laporan keuangan memainkan peran yang sangat vital dalam membantu pemangku kepentingan memahami dan menilai kinerja keuangan suatu entitas. Definisi, tujuan, dan komponen laporan keuangan

menjadi fondasi yang kuat untuk pemahaman mendalam mengenai aspek-aspek ini. Sementara teknologi terus memperkaya metode penyajian, tantangan dalam penyusunan laporan keuangan menekankan perlunya kehati-hatian dan kejelasan untuk menjaga integritas informasi keuangan.

**Rasio Keuangan Pemerintah Daerah**

Pengelolaan keuangan pemerintahan daerah merupakan aspek krusial dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik. Analisis rasio keuangan menjadi alat yang efektif untuk memahami kesehatan keuangan pemerintah daerah, mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, dan potensi risiko. Beberapa rasio keuangan kunci yang digunakan dalam analisis ini mencakup Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah, Rasio Aktivas/Ekonomi, dan Rasio Pertumbuhan (Zulkarnain, 2020).

**Rasio Kemandirian**

Rasio Kemandirian merupakan parameter yang mengukur sejauh mana pemerintah daerah mampu mengelola dan membiayai kegiatan-kegiatan operasionalnya sendiri tanpa terlalu bergantung pada transfer dari pemerintah pusat. Dalam literatur keuangan daerah, rasio ini dihitung dengan membandingkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan total Pendapatan Daerah. Keberhasilan mencapai tingkat kemandirian yang tinggi dapat memberikan pemerintah daerah fleksibilitas finansial dalam menghadapi dinamika ekonomi dan kebijakan fiskal nasional (Awani & Hariani, 2021). Rumus untuk menghitung rasio kemandirian adalah sebagai berikut :

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Total Pendapatan Daerah}}$$

**Tabel 1.** Pola Hubungan dan Tingkat Kemandirian

<b>Kemampuan Keuangan</b>	<b>Rasio Kemandirian (%)</b>	<b>Pola Hubungan</b>
Rendah Sekali	0-25	Intruktif
Rendah	25-50	Konsulatif
Sedang	50-75	Partisipatif
Tinggi	75-100	Delegatif

Sumber : (Amal & Wibowo, 2022)

**Rasio Efektivitas dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah**

Rasio ini mencakup sejumlah parameter yang mengukur efektivitas dan efisiensi dalam memanfaatkan Pendapatan Asli Daerah. Efektivitas diukur dari kemampuan pendapatan asli untuk memenuhi kebutuhan dan dukungan terhadap pembangunan. Sementara itu, efisiensi mencakup aspek-aspek seperti biaya pengumpulan dan administrasi pendapatan. Analisis mendalam terhadap rasio ini memberikan wawasan tentang bagaimana pemerintah daerah memanfaatkan sumber daya lokalnya untuk mencapai tujuan Pembangunan (Moridu, 2021). Rumus untuk menghitung rasio efektivitas adalah :

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah PAD}}{\text{Anggaran Pendapatan Asli Daerah PAD}}$$

**Tabel 2.** Kriteria Efektivitas Kinerja Keuangan Daerah

<b>Efektivitas Keuangan Daerah</b>	<b>Kategori</b>
Di atas 100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
Di bawah 60%	Tidak Efektif

Sumber : (Amal & Wibowo, 2022)

Rasio efisiensi merupakan ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana suatu entitas atau proses dapat mencapai hasil yang optimal dengan menggunakan sumber daya



yang tersedia. Dalam konteks keuangan, rasio efisiensi mencerminkan kemampuan suatu organisasi atau perusahaan dalam mengelola dan memanfaatkan aset, biaya, atau pendapatan dengan sebaik-baiknya. Rasio efisiensi menggambarkan perbedaan antara jumlah biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan pendapatan dengan jumlah pendapatan yang benar-benar diterima. Evaluasi efisiensi kinerja pemerintahan daerah dapat dikategorikan sebagai efisien jika rasio yang dihasilkan berada di bawah 100%. Oleh karena itu, diperlukan perhitungan yang teliti dalam menilai jumlah biaya yang diperlukan untuk menghasilkan pendapatan agar dapat dievaluasi apakah kegiatan pemungutan dana efisien atau tidak. Keberhasilan pemerintah daerah dalam mencapai target penerimaan pendapatan akan memiliki dampak yang lebih bermakna jika biaya yang dikeluarkan untuk mengumpulkan pendapatan tidak melebihi pendapatan yang sebenarnya diterima (Amal & Wibowo, 2022). Analisis rasio efisiensi dapat membantu organisasi untuk mengidentifikasi area-area yang dapat dioptimalkan, meningkatkan produktivitas, dan mengurangi pemborosan dalam operasionalnya. Berikut adalah rumus untuk mengukur rasio efisiensi :

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Total Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Total Pendapatan Daerah}}$$

**Tabel 3. Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan**

<b>Efisiensi Keuangan Daerah</b>	<b>Kategori</b>
Di atas 100%	Tidak Efisien
90% - 100%	Kurang Efisien
80% - 90%	Cukup Efisien
60% - 80%	Efisien
Di bawah 60%	Sangat Efisien

Sumber : (Amal & Wibowo, 2022)

### **Rasio Ekonomi**

Rasio ekonomi adalah ukuran kuantitatif yang digunakan untuk mengevaluasi hubungan antara elemen-elemen ekonomi yang relevan, seperti pendapatan, belanja, atau investasi. Rasio ini memberikan gambaran yang lebih jelas dan terukur mengenai performa ekonomi suatu entitas, seperti perusahaan, negara, atau wilayah. Dengan membandingkan berbagai variabel ekonomi, rasio ekonomi membantu dalam menganalisis efisiensi, produktivitas, dan stabilitas ekonomi. Rasio ini dapat mencakup berbagai aspek, termasuk rasio keuangan, pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, dan tingkat pengangguran, yang semuanya memberikan informasi penting bagi para pengambil keputusan, analis, serta peneliti untuk memahami dinamika dan kesehatan ekonomi suatu entitas dalam konteks yang lebih luas. Sebagai alat evaluasi yang sangat penting, rasio ekonomi sering digunakan dalam pengambilan keputusan strategis dan perencanaan keuangan untuk mencapai tujuan ekonomi yang optimal. (Aribowo et al., 2023). Berikut merupakan rumus rasio ekonomi :

$$\text{Rasio Ekonomi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Anggaran Belanja Daerah}}$$

### **Rasio Pertumbuhan**

Rasio Pertumbuhan mencerminkan dinamika ekonomi dan pertumbuhan keuangan pemerintah daerah dari waktu ke waktu. Dalam literatur keuangan daerah, rasio ini dapat mencakup pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah, Belanja Daerah, dan Surplus atau Defisit Anggaran. Analisis rasio pertumbuhan memberikan gambaran tentang stabilitas dan potensi pembangunan ekonomi di tingkat lokal (Aini et al., 2023). Rumus rasio pertumbuhan adalah sebagai berikut :

$$\text{Pertumbuhan Total Pendapatan} = \frac{(\text{Total Pendapatan t1} - \text{Total Pendapatan t-1})}{\text{Total Pendapatan t-1}}$$

$$\text{Pertumbuhan Total Belanja} = \frac{(\text{Total Belanja t1} - \text{Total Belanja t-1})}{\text{Total Belanja t-1}}$$

Dalam mengimplementasikan analisis rasio keuangan pada pemerintahan daerah, penting untuk memahami konteks lokal, regulasi, dan karakteristik ekonomi setempat. Keberhasilan dalam menerapkan analisis rasio ini akan memberikan pandangan yang mendalam tentang kesehatan keuangan pemerintah daerah, memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik terkait kebijakan fiskal, pembangunan, dan pelayanan publik. Keseluruhan, literatur mengenai analisis rasio keuangan pada pemerintahan daerah memberikan kerangka kerja yang kokoh untuk mengukur dan meningkatkan kinerja keuangan entitas tersebut.

### **Penilaian Kinerja**

Pengukuran kinerja atau penilaian kinerja merupakan suatu proses integral yang telah menjadi fokus perhatian dalam dunia manajemen dan sumber daya manusia. Tujuan utama dari pengukuran kinerja adalah untuk memotivasi karyawan agar mencapai tujuan organisasi dan memenuhi standar perilaku yang telah ditetapkan, sehingga organisasi dapat mencapai hasil yang diinginkan. Penilaian kinerja menjadi landasan bagi pengembangan individu, pengambilan keputusan manajerial, dan pengelolaan sumber daya manusia secara efektif. Dalam konteks ini, beberapa tujuan utama penilaian kinerja dapat diidentifikasi berdasarkan pemahaman dan literatur yang ada. Salah satu tujuan utama penilaian kinerja, seperti yang diungkapkan (Amal & Wibowo, 2022) adalah untuk meningkatkan strategi komunikasi dalam suatu organisasi. Penilaian kinerja menciptakan platform yang memungkinkan komunikasi dua arah antara manajemen dan karyawan. Melalui dialog dan umpan balik yang terstruktur, organisasi dapat memperjelas ekspektasi, memberikan arahan, dan memberikan apresiasi atas pencapaian karyawan. Komunikasi yang efektif ini mendukung penciptaan lingkungan kerja yang terbuka, saling percaya, dan berkolaborasi (Yahya Dwi & Muna Wardah, 2021).

Penilaian kinerja juga memiliki tujuan untuk mengukur kinerja keuangan dan non-keuangan secara tertimbang guna melacak kemajuan implementasi strategi organisasi. Dalam menghadapi lingkungan bisnis yang terus berubah, organisasi membutuhkan alat yang dapat memberikan pandangan menyeluruh terhadap pencapaian tujuan strategis. Rasio keuangan tradisional dikombinasikan dengan pengukuran non-keuangan seperti kepuasan pelanggan, inovasi produk, dan efisiensi operasional memberikan gambaran yang lengkap dan seimbang tentang kinerja organisasi. Pengukuran ini memungkinkan manajemen untuk mengidentifikasi area-area yang perlu perhatian lebih lanjut dan membuat perubahan strategis yang relevan.

Penilaian kinerja dianggap sebagai alat pemenuhan yang berdasarkan kemampuan rasional individu dan kolektif. Dalam hal ini, penilaian kinerja bukan hanya sebagai instrumen evaluasi, tetapi juga sebagai sarana untuk memberikan penghargaan dan pengakuan kepada individu atau tim yang telah mencapai atau melampaui target kinerja. Pemenuhan ini dapat berupa peningkatan gaji, bonus, promosi, atau pengakuan formal lainnya yang dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan karyawan. Dengan memberikan imbalan yang sesuai dengan pencapaian kinerja, organisasi menciptakan iklim yang mendukung motivasi intrinsik dan ekstrinsik, merangsang produktivitas, dan memperkuat loyalitas karyawan (Putra et al., 2021). Dalam melihat evolusi penilaian kinerja terlihat bahwa pendekatan tradisional yang hanya berfokus pada aspek keuangan semakin berkembang menjadi metode yang lebih holistik. Pergeseran ini mencerminkan pemahaman bahwa pencapaian tujuan organisasi tidak hanya diukur dari sudut pandang finansial semata, tetapi juga melibatkan dimensi manusia dan sosial. Oleh karena itu, implementasi sistem penilaian kinerja yang holistik dan berorientasi ke depan semakin diakui sebagai suatu keharusan dalam mengelola organisasi modern. Dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan karyawan, serta memastikan keterkaitan antara penilaian kinerja dengan tujuan strategis organisasi, praktik penilaian kinerja dapat menjadi

daya ungkit yang kuat untuk pertumbuhan dan keberlanjutan organisasi di era dinamika bisnis yang terus berkembang.

## METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kuantitatif Deskriptif, yang dirancang untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai dampak pandemi COVID-19 terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Bali. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk mengukur sejauh mana terjadinya perubahan dan variasi dalam indikator keuangan selama periode pandemi (Sugiyono, 2018). Data keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Bali akan diambil dari Data APBD, yang mencakup periode sebelum, selama, dan setelah pandemi.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup data sekunder dan data primer. Data sekunder akan diperoleh dari Data APBD Provinsi Bali yang telah disediakan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melalui laman resminya. Sementara itu, data primer akan diperoleh dari jurnal, artikel, dan buku yang relevan dengan dampak pandemi COVID-19 terhadap keuangan pemerintah daerah. Sumber data primer ini akan memberikan konteks dan wawasan yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor eksternal dan internal yang memengaruhi kinerja keuangan. Penggunaan kombinasi data sekunder dan primer diharapkan dapat memberikan analisis yang komprehensif dan mendalam terkait dampak pandemi COVID-19 terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Bali (Sugiyono, 2017).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Rasio Pertumbuhan

**Tabel 4.** Perhitungan Rasio Pertumbuhan Total Pendapatan TA 2019 - 2022

Tahun / Pemerintah Daerah	2019	2020	2021	2022
PROVINSI BALI	6,17%	-13,95%	3,58%	-0,31%
Badung	6,88%	-32,57%	-30,67%	4,88%
Bangli	6,50%	-14,23%	13,65%	-3,89%
Buleleng	11,48%	-12,47%	3,99%	-0,20%
Gianyar	15,29%	-18,37%	-15,27%	33,32%

Sumber : Diolah Penulis

Berdasarkan data rasio pertumbuhan pada Tabel 4 untuk Provinsi Bali dan beberapa kabupaten/kota di dalamnya (Badung, Bangli, Buleleng, Gianyar), dapat ditarik beberapa analisis terkait dengan dinamika keuangan pemerintah daerah dari tahun 2019 hingga 2022. Pada tahun 2019, Provinsi Bali mencatat pertumbuhan sebesar 6,17%, menunjukkan kinerja ekonomi yang positif. Namun, pada tahun 2020, terjadi penurunan signifikan sebesar -13,95%, yang dapat diatributkan kepada dampak pandemi Covid-19. Perubahan APBD dan alokasi anggaran yang dilakukan untuk penanganan pandemi mungkin menjadi faktor utama dalam pertumbuhan negatif ini. Pada tahun 2021, Provinsi Bali mencatat pertumbuhan sebesar 3,58%, menunjukkan tanda-tanda pemulihan ekonomi setelah tahun sebelumnya yang sulit. Meskipun pertumbuhan tetap positif, tahun 2022 mencatat pertumbuhan yang sedikit negatif sebesar -0,31%, yang dapat menjadi sinyal perhatian bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki strategi keuangan.

Badung, Bangli, Buleleng, dan Gianyar, masing-masing mengalami dinamika pertumbuhan yang berbeda dari tahun ke tahun. Badung, pada tahun 2019, mencatat pertumbuhan sebesar 6,88%, namun mengalami penurunan drastis pada tahun 2020 (-32,57%). Pada tahun 2021 dan 2022, terjadi pemulihan dengan pertumbuhan masing-masing sebesar -30,67% dan 4,88%. Bangli mencatat pertumbuhan positif pada tahun 2019 (6,50%) dan

pertumbuhan negatif pada tahun 2020 (-14,23%). Pada tahun 2021, terjadi pertumbuhan positif sebesar 13,65%, tetapi pada tahun 2022 mengalami penurunan kembali sebesar -3,89%. Buleleng, mengalami pertumbuhan signifikan pada tahun 2019 (11,48%) dan pertumbuhan negatif pada tahun 2020 (-12,47%). Pada tahun 2021, kembali mencatat pertumbuhan positif sebesar 3,99%, tetapi pada tahun 2022 mengalami penurunan yang minimal sebesar -0,20%. Gianyar mencatat pertumbuhan tinggi pada tahun 2019 (15,29%) dan pertumbuhan negatif pada tahun 2020 (-18,37%). Pada tahun 2021, terjadi pertumbuhan negatif lagi sebesar -15,27%, namun pada tahun 2022 mencatat pertumbuhan yang sangat signifikan sebesar 33,32%.

**Tabel 5.** Perhitungan Rasio Pertumbuhan Total Belanja TA 2019 - 2022

Tahun / Pemerintah Daerah	2019	2020	2021	2022
PROVINSI BALI	8,66%	-2,46%	-1,38%	7,63%
Badung	-1,13%	-32,38%	-27,51%	-4,07%
Bangli	-0,86%	-13,53%	10,45%	11,82%
Buleleng	9,18%	-11,00%	3,20%	0,45%
Gianyar	8,92%	-6,14%	-9,10%	11,01%

Sumber : Diolah Penulis

Provinsi Bali Pada tahun 2019 terjadi pertumbuhan positif sebesar 8,66%. Namun, pada tahun 2020, mengalami penurunan sebesar -2,46%. Pada tahun 2021 dan 2022, belanja kembali mengalami pertumbuhan positif masing-masing sebesar -1,38% dan 7,63%. Meskipun terdapat penurunan pada tahun 2020, namun belanja berhasil pulih dan meningkat pada tahun-tahun berikutnya. Badung Pada tahun 2019 mencatat pertumbuhan positif sebesar -1,13%. Namun, pada tahun 2020, mengalami penurunan yang signifikan sebesar -32,38%. Pada tahun 2021 dan 2022, belanja kembali mengalami pertumbuhan negatif masing-masing sebesar -27,51% dan -4,07%. Bangli Pada tahun 2019 mencatat pertumbuhan negatif sebesar -0,86%. Pada tahun 2020, terjadi penurunan yang signifikan sebesar -13,53%. Namun, pada tahun 2021 dan 2022, belanja kembali mengalami pertumbuhan positif masing-masing sebesar 10,45% dan 11,82%. Pada tahun 2019 Buleleng mencatat pertumbuhan positif sebesar 9,18%. Meskipun mengalami penurunan pada tahun 2020 (-11,00%), belanja kembali mengalami pertumbuhan pada tahun 2021 (3,20%) dan tahun 2022 (0,45%). Meskipun pertumbuhannya tidak signifikan, namun menandakan adanya upaya pemulihan. Gianyar mencatat pertumbuhan positif pada tahun 2019 (8,92%), namun mengalami penurunan pada tahun 2020 (-6,14%). Pada tahun 2021, belanja kembali mengalami pertumbuhan negatif sebesar -9,10%. Namun, pada tahun 2022, Gianyar mencatat pertumbuhan positif yang signifikan sebesar 11,01%. Hal ini mungkin mencerminkan kebijakan pemulihan ekonomi yang berhasil.

Secara umum semua daerah di Provinsi Bali mengalami dampak negatif pada tahun 2020 akibat pandemi COVID-19, terutama pada pendapatan. Beberapa daerah, seperti Gianyar, mampu pulih dengan cepat dan mencatat pertumbuhan positif yang signifikan pada tahun 2022. Dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi, penting untuk daerah-daerah ini terus mengoptimalkan kebijakan fiskal, termasuk alokasi anggaran, untuk memitigasi risiko dan mendukung pemulihan ekonomi. Analisis ini sejalan dengan (Dewantara & Nufitasari, 2021) yang menyatakan bahwa dampak pandemi terhadap kinerja keuangan daerah dapat sangat bervariasi tergantung pada kebijakan dan langkah-langkah pemulihan yang diambil oleh pemerintah daerah masing-masing.

### **Rasio Kemandirian**

**Tabel 6.** Perhitungan Rasio Kemandirian Provinsi Bali TA 2019 - 2022

Tahun / Pemerintah Daerah	2019	2020	2021	2022	Rata-rata
------------------------------	------	------	------	------	-----------

PROVINSI BALI	60,54%	53,68%	52,63%	65,42%	58,06%
Badung	83,47%	54,20%	64,63%	96,22%	74,63%
Bangli	10,77%	10,31%	14,22%	13,03%	12,08%
Buleleng	15,98%	15,92%	18,82%	19,75%	17,62%
Gianyar	43,20%	28,96%	27,40%	40,97%	35,13%

Sumber : Diolah Penulis

Rasio kemandirian Provinsi Bali pada tahun 2019 sebesar 60,54%, mengindikasikan tingkat kemandirian keuangan yang berada pada kategori sedang. Pola hubungan dapat diklasifikasikan sebagai partisipatif. Pada tahun 2020 Terjadi penurunan rasio kemandirian menjadi 53,68%, yang masih berada dalam kategori sedang. Pola hubungan tetap partisipatif. Namun pada 2021 Rasio kemandirian sedikit menurun menjadi 52,63%, tetapi masih berada pada kategori sedang. Pola hubungan tetap partisipatif. Pada 2022 Terjadi peningkatan signifikan rasio kemandirian menjadi 65,42%, menunjukkan perbaikan yang substansial. Provinsi Bali masuk ke dalam kategori tinggi, dan pola hubungan dapat diklasifikasikan sebagai delegatif. Rata-rata rasio kemandirian selama periode ini mencapai 58,06%, menjadikan Provinsi Bali tetap dalam kategori sedang, mendekati tingkat kemandirian tinggi.

Badung Menunjukkan tingkat kemandirian yang tinggi pada tahun 2019 (83,47%), kemudian mengalami penurunan pada tahun 2020 dan 2021, dan kembali meningkat pada tahun 2022. Badung masuk ke dalam kategori tinggi sepanjang periode. Bangli Memiliki tingkat kemandirian yang rendah sepanjang periode, namun mengalami peningkatan pada tahun 2021 dan 2022. Masih berada dalam kategori rendah. Buleleng Menunjukkan peningkatan tingkat kemandirian yang konsisten setiap tahun. Pada tahun 2022, masuk ke dalam kategori tinggi. Gianyar Mengalami fluktuasi tingkat kemandirian, namun secara keseluruhan tetap dalam kategori sedang.

Provinsi Bali pada tahun 2022 mencapai tingkat kemandirian tinggi, yang mencerminkan pola hubungan yang lebih delegatif dengan pemerintah pusat. Selama tahun 2019-2021, pola hubungan lebih partisipatif, menandakan adanya intervensi atau dukungan pemerintah pusat dalam mendukung keuangan Provinsi Bali. Rasio kemandirian Provinsi Bali mengalami fluktuasi selama periode 2019-2022. Terjadi peningkatan yang signifikan pada tahun 2022, menjadikan Provinsi Bali masuk ke dalam kategori tinggi dan pola hubungan yang bersifat delegatif. Pola hubungan partisipatif pada tahun-tahun sebelumnya dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi dan kebijakan pemerintah pusat.

Hasil tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Widasari & Jahja, 2023) yang menyatakan bahwa dinamika kemandirian keuangan daerah dapat mengalami fluktuasi yang signifikan. Penelitian ini mendukung temuan bahwa Provinsi Bali pada tahun 2022 mencapai tingkat kemandirian yang tinggi, mencerminkan pola hubungan yang lebih delegatif dengan pemerintah pusat. Selama tahun 2019-2021, pola hubungan yang lebih partisipatif menunjukkan adanya intervensi atau dukungan pemerintah pusat dalam mendukung keuangan Provinsi Bali. Hal ini memberikan pemahaman lebih dalam mengenai keterkaitan antara hasil penelitian (Widasari & Jahja, 2023) dengan dinamika kemandirian keuangan Provinsi Bali. Temuan ini menekankan pentingnya memperhatikan faktor-faktor ekonomi dan kebijakan pemerintah pusat dalam membentuk pola hubungan dan tingkat kemandirian keuangan daerah di Indonesia.

### **Rasio Efektivitas**

**Tabel 7.** Perhitungan Rasio Efektivitas Provinsi Bali TA 2019 - 2022

Tahun / Pemerintah Daerah	2019	2020	2021	2022	Rata-rata
------------------------------	------	------	------	------	-----------

PROVINSI BALI	112,14%	81,58%	98,13%	128,76%	105,15%
Badung	71,19%	39,92%	62,18%	131,32%	76,15%
Bangli	91,28%	63,12%	156,87%	84,90%	99,04%
Buleleng	83,07%	79,31%	109,38%	97,67%	92,36%
Gianyar	100,85%	44,37%	48,62%	92,75%	71,65%

Sumber : Diolah Penulis

Rasio efektivitas kinerja keuangan Provinsi Bali dan beberapa pemerintah daerah di sana dapat dianalisis sebagai berikut. Rasio efektivitas Provinsi Bali selama periode 2019-2022 menunjukkan kategori "Sangat Efektif" dengan rata-rata sebesar 105,15%. Pada tahun 2019, Provinsi Bali telah mencapai 112,14% dari target penerimaan PAD, menunjukkan kinerja yang sangat efektif. Pada tahun 2020, terjadi penurunan efektivitas menjadi 81,58%, namun masih tetap dalam kategori efektif. Tahun 2021 mengalami peningkatan efektivitas kembali menjadi 98,13%, dan pada tahun 2022, Provinsi Bali mencapai tingkat efektivitas tertinggi sebesar 128,76%.

Badung menunjukkan variasi tingkat efektivitas yang signifikan. Pada tahun 2019, Badung mencapai tingkat efektivitas yang sangat tinggi (71,19%), tetapi mengalami penurunan tajam pada tahun 2020 (39,92%). Namun, pada tahun 2021, efektivitas kembali meningkat hingga 62,18%, dan mencapai tingkat tertinggi pada tahun 2022 sebesar 131,32%. Bangli memiliki variasi yang cukup besar dalam tingkat efektivitasnya. Pada tahun 2021, efektivitasnya mencapai tingkat tertinggi sebesar 156,87%, menunjukkan kemampuan luar biasa dalam mencapai target penerimaan PAD. Namun, pada tahun 2022, terjadi penurunan tajam menjadi 84,90%, menciptakan fluktuasi yang perlu mendapat perhatian. Buleleng menunjukkan tingkat efektivitas yang cukup stabil sepanjang periode. Pada tahun 2019 hingga 2022, efektivitasnya berada dalam kategori efektif hingga sangat efektif, dengan rata-rata sebesar 92,36%. Gianyar menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan dalam tingkat efektivitas. Pada tahun 2019 dan 2022, efektivitasnya mencapai tingkat sangat efektif, tetapi pada tahun 2020 dan 2021 mengalami penurunan yang cukup drastis.

Rasio efektivitas yang tinggi menunjukkan kemampuan daerah mencapai atau melebihi target penerimaan PAD, yang secara keseluruhan Provinsi Bali mencapai kategori "Sangat Efektif". Variasi tingkat efektivitas di antara pemerintah daerah dapat memberikan informasi tentang faktor-faktor yang memengaruhi performa mereka dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah. Pemantauan fluktuasi dan tren efektivitas perlu diperhatikan untuk mengidentifikasi potensi perbaikan dan perencanaan kebijakan keuangan yang lebih efektif di masa depan.

Hasil analisa rasio efektivitas kinerja keuangan Provinsi Bali yang menunjukkan kategori "Sangat Efektif" selama periode 2019-2022 secara konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh (Primahadi & Kurniawan, 2021) yang menyatakan efektivitas dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah untuk mencapai tingkat kemandirian keuangan daerah yang optimal. Temuan bahwa Provinsi Bali mampu secara konsisten mencapai atau melebihi target penerimaan PAD, seperti yang diukur melalui rasio efektivitas, memberikan kontribusi signifikan terhadap literatur yang mengamati faktor-faktor yang mendukung kemandirian keuangan daerah. Meskipun rinciannya tidak disebutkan, hasil penelitian ini memberikan konteks penting untuk memahami bahwa keefektifan dalam pengelolaan pendapatan daerah berdampak langsung pada tingkat kemandirian keuangan, yang merupakan temuan yang relevan dan konsisten dengan literatur terdahulu.

**Rasio Efisiensi**

**Tabel 8.** Perhitungan Rasio Efisiensi Provinsi Bali TA 2019 - 2022

Tahun / Pemerintah Daerah	2019	2020	2021	2022	Rata-rata
PROVINSI BALI	98,09%	111,19%	105,87%	114,29%	107,36%
Badung	98,98%	99,26%	103,79%	94,93%	99,24%
Bangli	98,39%	99,19%	96,39%	112,15%	101,53%
Buleleng	98,49%	100,14%	99,38%	100,03%	99,51%
Gianyar	96,56%	111,03%	121,15%	100,88%	107,41%

Sumber : Diolah Penulis

Hasil perhitungan efisiensi kinerja keuangan Provinsi Bali selama periode 2019-2022 menunjukkan rata-rata sebesar 107,36%, yang mengindikasikan tingkat efisiensi yang tidak efisien. Pada tahun 2019, efisiensi sebesar 98,09% menandakan tingkat efisiensi yang kurang efisien. Tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 111,19%, menunjukkan penurunan efisiensi yang signifikan. Tahun 2021 mencatat 105,87%, dan pada tahun 2022 efisiensi kembali menurun menjadi 114,29%.

Melihat pada pemerintah daerah di Provinsi Bali, Badung memiliki tingkat efisiensi rata-rata sebesar 99,24%, menunjukkan kinerja yang kurang efisien selama periode tersebut. Bangli mencapai rata-rata efisiensi sebesar 101,53%, menandakan kinerja yang tidak efisien. Buleleng dan Gianyar juga mencapai tingkat efisiensi yang tidak baik dengan rata-rata masing-masing sebesar 99,51% dan 107,41%. Analisis ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan, Provinsi Bali dan pemerintah daerah di dalamnya mencapai tingkat efisiensi yang kurang baik dalam pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Rata-rata efisiensi yang berada di atas 100% menandakan tingkat efisiensi yang tidak baik dan dapat menjadi indikator untuk menghambat target penerimaan PAD yang lebih optimal di masa depan.

Hasil analisis rasio efisiensi kinerja keuangan Provinsi Bali sejalan dengan temuan dalam penelitian yang dilakukan oleh (Loise, 2023) yang menyatakan bahwa efisiensi dalam pengelolaan pendapatan daerah dapat menjadi kunci keberhasilan dalam mencapai target penerimaan PAD yang optimal. (Loise, 2023) juga menekankan bahwa provinsi dan pemerintah daerah di dalamnya dapat mengadopsi praktik efisiensi yang baik untuk meningkatkan kinerja keuangan dan mengoptimalkan penerimaan daerah. Dengan demikian, hasil analisis rasio efisiensi Provinsi Bali dapat memberikan kontribusi positif dalam konteks penelitian terdahulu tersebut dan memberikan pandangan tambahan tentang pentingnya efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah.

**Rasio Ekonomi**

**Tabel 9.** Perhitungan Rasio Ekonomi Provinsi Bali TA 2019 - 2022

Tahun / Pemerintah Daerah	2019	2020	2021	2022	Rata-rata
PROVINSI BALI	95,38%	87,33%	73,45%	110,60%	91,69%
Badung	72,20%	61,52%	73,95%	82,89%	72,64%
Bangli	85,36%	81,36%	96,19%	98,70%	90,40%
Buleleng	93,51%	85,47%	88,05%	97,70%	91,18%
Gianyar	83,73%	68,84%	71,69%	91,44%	78,93%

Sumber : Diolah Penulis

Rasio ekonomi Provinsi Bali selama periode 2019-2022 dapat memberikan wawasan yang bermanfaat terkait dengan efisiensi dan fokus pengeluaran daerah. Rasio belanja operasi, yang mencerminkan proporsi total belanja yang dialokasikan untuk kegiatan operasional, menunjukkan tingkat aktivitas dan keberlanjutan pelayanan publik. Selama periode tersebut, rata-rata rasio belanja operasi Provinsi Bali mencapai 91,69%, menggambarkan komitmen yang cukup tinggi dalam memastikan operasional pemerintahan dan keberlanjutan layanan. Dalam analisis lebih mendalam, Badung menunjukkan variasi tingkat ekonomi yang signifikan, dengan rata-rata rasio belanja operasi sebesar 72,64%. Hal ini menunjukkan kecenderungan Badung untuk lebih fokus pada kegiatan operasional dibandingkan dengan belanja modal. Sebaliknya, Bangli dan Buleleng menunjukkan rasio belanja operasi yang cukup tinggi, mencapai rata-rata masing-masing sebesar 90,40% dan 91,18%, menunjukkan prioritas yang kuat pada kegiatan operasional.

Gianyar meskipun menunjukkan peningkatan dari tahun 2019 hingga 2022, masih memiliki rata-rata rasio belanja operasi sebesar 78,93%. Meskipun angka ini mengindikasikan fokus pada operasional, fluktuasi tahun demi tahun menunjukkan kemungkinan penyesuaian prioritas dan alokasi dana. Sementara itu, rasio belanja modal yang mengukur proporsi total belanja yang diarahkan untuk investasi dan pengembangan daerah menunjukkan kecenderungan yang berbeda. Rata-rata rasio belanja modal Provinsi Bali mencapai 8,31%, menandakan upaya terbatas dalam pemenuhan kebutuhan pembangunan dan investasi daerah. Meskipun Badung menunjukkan rasio belanja modal yang sedikit lebih tinggi, mencapai rata-rata 27,36%, perlu diperhatikan bahwa fokus pada belanja modal masih bisa ditingkatkan di seluruh provinsi.

Analisis rasio ekonomi ini memberikan pandangan yang penting tentang kebijakan anggaran dan prioritas pengeluaran Provinsi Bali serta pemerintah daerah di dalamnya. Dengan memahami keseimbangan antara belanja operasi dan modal, provinsi dapat mengoptimalkan alokasi dana untuk mencapai tujuan jangka pendek dan jangka panjangnya. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Lantemona et al., 2020) yang menyatakan peningkatan dalam belanja modal dapat memberikan dampak positif pada pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di tingkat provinsi dan daerah.

## **PENUTUP**

Pandemi COVID-19 telah memberikan tantangan yang luar biasa terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Bali, tercermin dalam hasil penelitian ini. Ringkasan keseluruhan hasil penelitian memberikan gambaran yang komprehensif tentang dampak pandemi terhadap pendapatan, belanja, kemandirian, efektivitas, efisiensi, dan aktivitas keuangan daerah. Dalam menghadapi turbulensi ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi, Provinsi Bali dan pemerintah daerah di dalamnya telah menunjukkan ketangguhan dalam mengelola keuangan daerah. Meskipun mengalami penurunan signifikan pada tahun 2020, beberapa langkah kebijakan telah diambil untuk memitigasi dampak negatif tersebut. Tanda-tanda pemulihan ekonomi pada tahun 2021 memberikan harapan, meskipun tahun 2022 menunjukkan tantangan baru.

Pertumbuhan pendapatan yang positif pada tahun 2019 telah tergantikan oleh penurunan tajam pada tahun 2020, dengan pandemi memberikan dampak langsung pada sektor-sektor ekonomi. Meskipun adanya pemulihan pada tahun-tahun berikutnya, perlu perhatian khusus terhadap strategi keuangan guna mengatasi ketidakpastian yang masih berlanjut. Rasio kemandirian yang meningkat pada tahun 2022 memberikan sinyal positif, menunjukkan usaha Provinsi Bali untuk mengurangi ketergantungan pada transfer dan pinjaman. Meskipun demikian, fluktuasi tingkat kemandirian di beberapa daerah menekankan perlunya pengelolaan keuangan yang adaptif dan responsif terhadap perubahan kondisi ekonomi.

Rasio efektivitas yang tinggi sepanjang periode menandakan keberhasilan dalam pencapaian target pendapatan PAD, mengindikasikan upaya-upaya yang diterapkan untuk memaksimalkan penerimaan daerah. Meskipun demikian, variasi efektivitas di antara daerah menyoroti pentingnya penyesuaian strategi yang spesifik dengan kondisi masing-masing. Rasio efisiensi yang cukup baik, terutama dalam pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD), mencerminkan usaha Provinsi Bali untuk memaksimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia. Tingkat efisiensi yang tetap tinggi dapat menjadi landasan untuk pengelolaan keuangan yang berkelanjutan dan optimal.

Analisis rasio aktivitas menyoroti fokus yang tinggi pada belanja operasi, yang menunjukkan komitmen terhadap keberlanjutan pelayanan publik. Meskipun demikian, terdapat peluang untuk meningkatkan alokasi dana pada belanja modal untuk mendukung pembangunan dan pertumbuhan jangka panjang. Secara keseluruhan hasil penelitian ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang dinamika keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Bali selama masa pandemi COVID-19. Dengan menyusun strategi kebijakan yang tepat dan adaptif, Provinsi Bali dapat terus menghadapi tantangan ekonomi dan membangun fondasi keuangan yang kuat untuk masa depan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Aini, D. N., Ningsih, P. A., & Rahma, S. (2023). Analisis Kinerja Keuangan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Rasio Efektivitas dan Rasio Pertumbuhan pada Kantor Desa Jati Mulyo Tanjung Jabung Timur. *JREA (Jurnal Riset Ekonomi Dan Akuntansi)*, 1(1), 125–140.
- Amal, M. I., & Wibowo, P. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Sebelum Dan Sesudah Pandemi Covid-19. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 4(1), 83–93. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v4i1.1723>
- Aribowo, N. C., Damayanti, A. Y., & Bharata, R. W. (2023). Analisis Manajemen Utang Terhadap Penilaian Risiko Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Magelang Tahun 2021-2022. *Jurnal Riset Akuntansi Keuangan*, 6(1), 57–65.
- Awani, M. F., & Hariani, S. (2021). Analisa Rasio Kemandirian Daerah dan Rasio Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *AKURASI: Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 3(2), 95–102. <https://doi.org/10.36407/akurasi.v3i2.158>
- Darwis, D., Meylinda, M., & Suaidah, S. (2022). Pengukuran Kinerja Laporan Keuangan Menggunakan Analisis Rasio Profitabilitas Pada Perusahaan Go Public. *Jurnal Ilmiah Sistem Informasi Akuntansi*, 2(1), 19–27. <https://doi.org/10.33365/jimasia.v2i1.1875>
- Dewantara, R., & Nufitasari, D. (2021). Politik Hukum Pengaturan Mengenai Tindakan Pencegahan Non Performing Loan Pada Bank Dalam Masa Pandemi Dengan Pendekatan Konsep Bifurkasi Hukum. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 6(1), 66–83. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v6i1.176>
- Fajria, Z., Wahono, B., & Farida, E. (2021). Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Fiscal Stress, Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dengan Kinerja Keuangan Sebagai Variabel Intervening Di Provinsi Bali Pada Masa Pandemi Covid-19. *Riset Manajemen*, 10, 1–20.
- Lantemona, I. A., Koleangan, R. A. M., & Walewangko, E. N. (2020). Pengaruh Belanja Modal, Penyaluran Kredit Dan Tingkat Suku Bunga Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 21(2), 30–43.
- Loise, M. (2023). Evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah Mengenai Pajak Parkir di Kota Makassar. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume*, 3(6), 4773–4782.
- Maria, E., Kristen, U., Wacana, S., & Halim, A. (2021). E-GOVERNMENT DAN KORUPSI: STUDI DI PEMERINTAH DAERAH, INDONESIA DARI PERSPEKTIF TEORI

- KEAGENAN. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, 5(1), 1–19.  
<https://doi.org/10.24034/j25485024.y2021.v5.i1.4789>
- Moridu, I. (2021). Efisiensi dan Efektivitas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banggai Efficiency and Effectiveness of Regional Original Revenue of Banggai Regency. *Jurnal Sinar Manajemen*, 08, 90–97.
- Primahadi, R., & Kurniawan, R. (2021). Analisis Efektivitas, Kontribusi Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Serta Tingkat Kemandirian Daerah Kota Pariaman. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 5(1), 84.  
<https://doi.org/10.33087/ekonomis.v5i1.312>
- Purnomo, S. D., & Danuta, K. S. (2022). Analisis Kemampuan Keuangan Daerah terhadap Kemiskinan: Studi Empiris di Sumatera Utara. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 6(1), 215. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v6i1.513>
- Puspita, W. D., & Pangastuti, D. A. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Batu Sebelum Dan Saat Pandemi Covid-19. *Among Makarti*, 15(1), 90–104.  
<https://doi.org/10.52353/ama.v15i1.246>
- Putra, M. W., Darwis, D., & Priandika, A. T. (2021). Pengukuran Kinerja Keuangan Menggunakan Analisis Rasio Keuangan Sebagai Dasar Penilaian Kinerja Keuangan (Studi Kasus: CV Sumber Makmur Abadi Lampung Tengah). *Jurnal Ilmiah Sistem Informasi Akuntansi*, 1(1), 48–59. <https://doi.org/10.33365/jimasia.v1i1.889>
- Putri, P. (2020). Excel Mempermudah Penyusunan Laporan Keuangan. *JURNAL PRODIKMAS Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 50–58.  
<https://doi.org/10.30596/jp.v4i2.6321>
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Alfabeta.
- Venni, R., Ahmad, A. W., & Maryati, U. (2023). Analisis Kinerja Keuangan Sebelum dan Saat Pandemi Covid-19 pada Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia Tahun 2018-2021. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 7(2), 1134.  
<https://doi.org/10.33087/ekonomis.v7i2.1372>
- Wardoyo, D. U., Rahmadani, R., & Hanggoro, P. T. (2022). Good Corporate Governance Dalam Perspektif Teori Keagenan. *EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 1(1), 39–43.
- Widasari, R., & Jahja, A. S. (2023). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Sebelum Dan Setelah Masa Pandemi Covid-19 ( Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat ). *BULLET : Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2(06), 1279–1289.
- Widiastoeti, H., & Sari, C. A. E. (2020). Penerapan Laporan Keuangan Berbasis Sak- Pada Umkm Kampung Kue Di Rungkut Surabaya. *Jurnal Analisi, Predeksi Dan Informasi (Jurnal EKBIS)*, 21(1), 1–15.
- Yahya Dwi, W., & Muna Wardah, A. (2021). Pengujian Blackbox Sistem Informasi Penilaian Kinerja Karyawan Pt Inka (Persero) Berbasis Equivalence Partitions Blackbox Testing of Pt Inka (Persero) Employee Performance Assessment Information System Based on Equivalence Partitions. *Jurnal Digital Teknologi Informasi*, 4(1), 22–26.
- Yulianti, V., Wulandari, D. S., & Sopiha, S. (2023). Analisis Stabilitas Keuangan dan Tekanan Eksternal Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan dengan Pendekatan Teori Keagenan. *Journal of Trends Economics and Accounting Research*, 3(4), 519–528.  
<https://doi.org/10.47065/jtear.v3i4.643>
- Zaki, A., Oktafiyani, M., & Yovita, L. (2023). Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Kecamatan Tuntang: Perspektif Teori Keagenan. *Article Information. Jekobs*, 2(1), 23–37.
- Zulkarnain, Z. (2020). Analisis Rasio Keuangan Daerah untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat. *Cakrawala*, 3(1), 61–74.